

BAB V

KESIMPULAN

Perkembangan AURI dalam konteks politik Indonesia antara tahun 1962 hingga 1966 merupakan suatu gerak yang tragis. Sejak pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dan reorganisasi militer pada tahun 1962, AURI merupakan kekuatan yang menjadi pendukung utama Presiden Sukarno dikalangan angkatan bersenjata. Hal ini tidaklah menjadi suatu keanehan, mengingat kedudukan presiden sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata serta kharisma presiden yang demikian kuat sebagai bapak pendiri bangsa Indonesia. Bahkan dapat dikatakan bahwa sulit untuk membayangkan Indonesia tanpa figur Sukarno.

Perkembangan politik nasional yang diarahkan Presiden Sukarno menuju suatu bentuk persekutuan nasionalis-agama-komunis (Nasakom) serta keinginan presiden mengakomodasi kekuatan komunis dalam pemerintahan, mengalami tantangan hebat dari Angkatan Darat. Sukarno yang melihat adanya loyalitas yang kuat dari AURI bagi dirinya, sebagai panglima tertinggi tentu mengetahui adanya hubungan yang kurang baik antara Kepala Staf AURI Komodor Suryadarma dengan KSAD (kemudian Menhankam) Jenderal AH.Nasution. Dengan memanfaatkan faktor tersebut, presiden tidak perlu berhadapan dengan AD secara terbuka karena masih memiliki sekutu tanpa syarat yakni KSAU Suryadarma.

Namun, Peristiwa Aru yang menenggelamkan *KRI Macan Tutul* dan menewaskan Deputy ALRI Komodor Yos Sudarso melahirkan kecaman terhadap kepemimpinan Suryadarma yang dianggap tidak mampu mengatur perlindungan

udara dalam peristiwa tersebut. Suryadarma kemudian dengan terpaksa diberhentikan dan diberikan jabatan baru sebagai penasihat militer presiden. Sedangkan Panglima AURI kemudian dijabat oleh Kolonel Udara Omar Dani. Tentunya dalam pandangan berbagai pihak, seperti AD, pergantian pimpinan AURI dapat mengubah organisasi AURI menjadi lebih netral terhadap kebijakan presiden.

Kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Kolonel (kemudian dinaikkan menjadi Laksdya) Omar Dani justru bersikap tidak berbeda dengan Suryadarma. Laksdya Omar Dani justru menjalin hubungan erat dengan presiden dengan mendukung setiap kebijakan presiden, seperti Politik Nasakom, pembebasan Irian Barat dan Konfrontasi Malaysia. Dalam konfrontasi Malaysia pada tahun 1963, Men/Pangau Omar Dani diberikan tugas tambahan, yakni memimpin jalannya operasi yang membawahi kekuatan empat angkatan.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, kebijakan negara yang terpusat dibawah otoritas Sukarno membuat banyak pihak tidak mampu memisahkan antara kepentingan kekuasaan dan negara. AURI sebagai organisasi militer profesional, cenderung tidak mampu memisahkan antara kepentingan kekuasaan Sukarno dengan kepentingan negara. Jebakan konsep "politik sebagai panglima" inilah yang kelak menjerumuskan AURI dalam persoalan politik 1965.

Peristiwa G-30-S yang mengakibatkan terbunuhnya tujuh perwira AD di Jakarta dan dua perwira AD di Jogjakarta, merupakan garis pemisah hubungan erat yang terjalin antara Sukarno dan AURI. Peristiwa ini berdampak pada rusaknya tatanan politik Demokrasi Terpimpin, serta melahirkan Angkatan Darat

di bawah pimpinan Mayjen Soeharto sebagai pemegang kekuasaan baru. Peristiwa G-30-S secara perlahan meruntuhkan kekuasaan Sukarno beserta lapisan yang mendukungnya, termasuk didalamnya AURI.

Dalam Peristiwa G-30-S, AURI dituduh sebagai salah satu pihak yang bertanggung-jawab. Hal ini didasarkan fakta adanya dukungan Men/Pangau Omar Dani pada 1 Oktober 1965 terhadap kelompok G-30-S, penggunaan fasilitas AURI serta keterlibatan personel AURI dalam penculikan para perwira AD di Lubang Buaya.

Berdasarkan penelitian tesis ini, tuduhan terhadap keterlibatan AURI perlu mendapatkan perhatian khusus. Dalam peristiwa G-30-S, tidak dapat ditolak bahwa pimpinan AURI, Laksdya Omar Dani mendukung G-30-S. Penggunaan fasilitas AURI yang begitu melimpah, sekalipun tidak disetujui pihak terkait AURI, tetapi terkesan dibiarkan terjadi. Begitu pula informasi yang didapatkan Omar Dani dari perwira intel Heru Atmodjo, tidak dilaporkan kepada Panglima Tertinggi ABRI, Presiden Sukarno. Tentunya apabila hal ini dinyatakan suatu kebetulan, maka ini adalah kebetulan yang konsisten dan menjadi sulit untuk dimengerti sebagai bentuk ketidakterlibatan.

Mengatakan bahwa AURI terlibat atau tidak terlibat dengan demikian menjadi pertanyaan yang sukar dijawab, karena memisahkan antara manusia dengan institusi adalah suatu pekerjaan percuma. Penelitian ini dengan berdasarkan berbagai sumber, meyakini bahwa Men/Pangau Omar Dani terlibat dalam pelaksanaan G-30-S, setidaknya dengan sikapnya yang mendukung.

Namun persoalan terpenting dari keterlibatan Men/Pangau Omar Dani adalah kepada siapa dukungan tersebut diberikan. Apabila sebelum G-30-S Omar cenderung memiliki pandangan yang sama dengan PKI, maka hal tersebut adalah untuk mengambil hati presiden. Begitupula dalam G-30-S, keterlibatan Omar Dani lebih diakibatkan kepada kesetiaannya kepada presiden, bukan kepada PKI. Dengan demikian surat ralat Men/Pangau atas surat 1 Oktober 1965, merupakan suatu langkah penyamaan persepsi dengan presiden yang menolak memberikan dukungan bagi G-30-S. Wajar juga apabila kemudian kebijakan Men/Pangau Omar Dani lebih cenderung akomodatif terhadap perubahan politik nasional yakni mendukung pembersihan terhadap G-30-S.

Dengan demikian penelitian ini menyimpulkan keterlibatan Omar Dani lebih di dasarkan atas loyalitasnya kepada Presiden Sukarno. Keterlibatan Omar Dani lebih bersifat responsif saat terjadinya peristiwa (*by accident*) bukan sesuatu yang direncanakan (*by design*). Bagaimanapun, tidak ada bukti yang mampu memperlihatkan secara nyata. Bukti yang menunjukkan ketidakterlibatan dalam perencanaan adalah sikap pernyataan Omar Dani pada 1 Oktober yang dikeluarkan secara spontan serta tidak adanya persiapan dalam dukungan yang efektif dalam G-30-S. Hal yang kedua tampak dari tidak adanya pengeboman atau serangan udara dari kelompok G-30-S, sebagaimana yang disarankan Supardjo. Padahal saat G-30-S terdesak pasukan Kostrad, dukungan efektif Omar dengan memberikan serangan udara kepada Kostrad akan memastikan kemenangan berada di pihak G-30-S.

Setelah terjadi pergantian Men/Pangau dari Omar Dani kepada Sri Mulyono Herlambang, maka AURI menjadi salah-satu kekuatan yang ikut menghancurkan G-30-S bersama kekuatan AD, AL dan Kepolisian. Namun, kepemimpinan Men/Pangau Laksdya Sri Mulyono mendapatkan tantangan hebat dari beberapa perwira AURI yang ingin membersihkan AURI dari kekuatan pendukung Sukarno. Memang, pada masa Demokrasi Terpimpin, Presiden Sukarno juga identik dengan PKI, apalagi paca G-30-S presiden juga tidak mau membubarkan partai komunis tersebut. Akibatnya antipati terhadap PKI juga ditujukan kepada presiden dan setiap pendukungnya, seperti yang dialami Laksdya Sri Mulyono Herlambang.

Adapun sikap para perwira muda, seperti Roesmin Nuryadin maupun Suyitno Sukirno adalah sikap yang wajar dalam konteks perubahan politik. Walaupun sikap mereka cenderung arogan dengan melawan atasan, tetapi tindakan tersebut merupakan suatu upaya yang ekstrim untuk menunjukkan AURI yang bersikap kritis terhadap suatu pemerintahan. Hal ini kemudian terus berlanjut ketika pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Sekalipun Roesmin pernah menjadi menteri perhubungan, Roesmin dan juga Suyitno kemudian aktif dalam kelompok Petisi 50 yang bersikap kritis terhadap kebijakan Orde Baru.

Dengan demikian, perubahan sikap AURI dalam fase transisi 1965-1966, meliputi dua cara. *Pertama* adalah cara akomodasi yang dilakukan lewat penyesuaian kebijakan dengan kondisi politik yang ada, seperti yang dilakukan Men/Pangau Laksdya Sri Mulyono Herlambang. *Kedua*, adalah cara perubahan yang dipaksakan secara terbuka oleh Roesmin Nuryadin dan Suyitno Sukirno.

Apapun cara yang dianggap tepat, pada akhirnya AURI berhasil melakukan proses transisi dengan damai. Perubahan yang berlangsung dari dalam, membuktikan bahwa AURI menunjukkan sikapnya sebagai alat negara yang menjaga keutuhan NKRI, sesuai dengan doktrinnya *Swa Bhwana Paksa*.

